

ABSTRAK

Undang-undang (UU) Militer di Indonesia yang utama saat ini diatur dalam UU No.3 Tahun 2025 (menggantikan UU 34/2004) tentang Tentara Nasional Indonesia (TNI), yang mengatur tugas, fungsi, dan usia pensiun prajurit. Selain itu UU No.25 Tahun 2014 mengatur hukum disiplin militer, serta UU No.31 Tahun 1997 mengatur peradilan militer. Peradilan militer merupakan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan Angkatan bersenjata untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatikan kepentingan penyelenggaraan pertahanan keamanan negara. Badan yang termasuk ke dalam ruang lingkup peradilan militer adalah badan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan militer yang meliputi Pengadilan Militer, Pengadilan Militer Tinggi, Pengadilan Militer Utama, dan Pengadilan Militer Pertempuran. Implementasi peraturan Militer ini untuk memastikan supremasi sipil dalam demokrasi, sekaligus mempertahankan kedisiplinan dan profesionalisme TNI sebagai alat pertahanan negara.

Kata Kunci: Undang-Undang Militer, Peradilan Militer, TNI

ABSTRACT

The main military law in Indonesia is currently regulated in Law No. 3 of 2025 (replacing Law 34/2004) concerning the Indonesian National Armed Forces (TNI), which regulates the duties, functions, and retirement age of soldiers. In addition, Law No. 25 of 2014 regulates military disciplinary law, while Law No. 31 of 1997 regulates military courts. Military courts are the executors of judicial power within the armed forces to uphold law and justice while taking into account the interests of national defense and security. The bodies included in the scope of military justice are those that exercise judicial power within the military justice system, which includes the Military Court, the High Military Court, the Supreme Military Court, and the Combat Military Court. The implementation of these military regulations is to ensure civilian supremacy in democracy, while maintaining the discipline and professionalism of the TNI as an instrument of national defense.

Keywords: Military Law, Military Court, TNI